

Analisis Pengenaan dan Kontribusi Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Mobil Bekas (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur)

Sophy Widya Lastari¹, Icha Fajriana²

Jurusan Akuntansi STIE Multi Data Palembang

e-mail: *1Sophywidya@mhs.mdp.ac.id, 2Icha.fajriana@stie-mdp.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi penyerahan mobil bekas yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak mobil bekas, dan tingkat persentase kontribusi dari penerimaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan mobil bekas pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pengenaan PPN atas penyerahan mobil bekas dilakukan oleh Wajib Pajak itu sendiri sesuai dengan sistem pemungutan pajak Self Assesment System, dimana terdiri dari beberapa proses yaitu proses perhitungan, proses penyetoran, dan proses pelaporan. Kontribusi PPN atas penyerahan mobil bekas pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur pada tahun 2014-2016 masih dalam kategori sangat kurang. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan pajak PPN untuk sektor bisnis ini.

Kata kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Mobil Bekas, Pengenaan PPN, Kontribusi

Abstract

The study was determine the mechanism of value added tax for the transaction of used car which is conducted by Used Taxable Car Entrepreneurs. The percentage rate of the value added tax revenue for the submission for used car at Tax Office Primary Palembang ilir timur. The research method used are qualitative and descriptive design. The data used are primary and secondary data, with the data collective technique, interviews and observations. The results of this study indicates that the mechanism of imposition of Value Added Tax on the delivery of used cars is done by the Taxpayers themselves according to the tax collection system of Self Assessment System, which consists of several processes, namely the calculation process, the deposit process, and the reporting process. Value Added Tax contribution on the delivery of used cars at KPP Pratama Palembang Ilir Timur in 2014-2016 very less category is because of understanding and knowledge of Value Added Tax rules for this business sector.

Keywords: Value Added Tax, Used Car, Value Added Tax Imposition, Contribution

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu bisnis tidak dapat terhindar dari aspek perpajakan, begitu pula dengan bisnis mobil bekas. Hal ini dikarenakan penyerahan atas mobil bekas termasuk objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) seperti yang diatur dalam Undang-Undang PPN Pasal 4 dan

Pasal 1A No. 42 Tahun 2009. Maka dari itu, sudah menjadi kewajiban bagi Pengusaha Kena Pajak mobil bekas untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN terutanganya kepada Negara.

Ketentuan yang digunakan dalam perhitungan penyerahan mobil bekas diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79 tahun 2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha Tertentu. Dalam pelaksanaan pengenaannya diindikasikan bahwa masih banyak pengusaha mobil bekas di Kota Palembang yang tidak memenuhi kewajibannya dalam menghitung PPN terutanganya atas penjualan mobil bekas. Hal tersebut dikarenakan selain masih banyak pengusaha mobil bekas yang berstatus Non-PKP, juga terjadi karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan mereka mengenai aturan PPN. Faktor inilah yang kemudian menghambat proses pelaksanaan dalam pengenaan PPN untuk mobil bekas ini.

Dalam penelitian yang berjudul Analisis Potensi Penerimaan dan Efektivitas PPN atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas Terhadap Penerimaan PPN (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara) oleh Aprilian, Sudjana, Yaningwati (2014) mendapatkan hasil bahwa masih banyak potensi PPN atas penyerahan mobil bekas yang bisa digali dan pemungutannya cukup efektif walaupun belum mencapai target. Kemudian penelitian tersebut membahas sedikit tentang kontribusi PPN atas penyerahan mobil bekas terhadap KPP Pratama Malang Utara dan menemukan bahwa kontribusi PPN atas penyerahan mobil bekas pada KPP Pratama Malang Utara dapat dikatakan masih sangat kurang. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa adanya potensi yang besar terhadap penerimaan PPN atas penyerahan mobil bekas sehingga dirasa perlu upaya untuk meningkatkan jumlah kontribusinya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kontribusi dan mekanisme pengenaan PPN atas penyerahan mobil bekas merupakan hal yang menarik untuk dikaji lebih dalam. Penulis akan melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur. Alasan memilih penelitian di KPP tersebut karena dapat dikatakan bahwa *Showroom* mobil bekas Kota Palembang terpusat di kawasan Jalan Veteran, yang masih merupakan ruang lingkup KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Hal tersebut dibuktikan dengan terdapat banyaknya usaha jual beli mobil bekas, Sehingga kemungkinan banyak Wajib Pajak yang melakukan usaha mobil bekas melaporkan pajak terutanganya disana.

Oleh karena itu penulis akan mengambil judul “**ANALISIS PENGENAAN DAN KONTRIBUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN MOBIL BEKAS (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur)**”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi penyerahan mobil bekas oleh Pengusaha Kena Pajak mobil bekas?
2. Bagaimana tingkat kontribusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan mobil bekas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi penyerahan mobil bekas oleh Pengusaha Kena Pajak mobil bekas.
2. Untuk menilai tingkat kontribusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan mobil bekas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur.

2. LANDASAN TEORI

2.1 Teori Bakti

Teori ini mendasar pada paham *Organische Staatsleer*. Paham ini mengajarkan bahwa karena adanya sifat suatu negara, sehingga timbulah hak mutlak untuk memungut pajak. Orang-orang tidaklah dapat berdiri sendiri. Jika tidak ada persekutuan, maka tidak akan ada individu. Oleh sebab itu, persekutuan (yang merupakan negara) berhak atas satu dengan yang lain. Akhirnya, setiap orang menyadari bahwa adanya kewajiban yang mutlak untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak (Resmi, 2014, h.6).

2.2 Teori Dasar Pajak

a. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

b. Fungsi *Budgetair* (Penerimaan)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair* yang merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan negara (Resmi, 2014, h.3).

c. Jenis Pajak

Jenis pajak yang dikelompokkan menjadi tiga yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutannya (Resmi, 2014, h. 7-8).

d. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak terdiri dari tiga yaitu *Official Assesment System*, *Self Assesment System*, dan *With Holding System* (Resmi, 2014, h. 11)

2.3 Pajak Pertambahan Nilai

PPN (VAT) disebut juga sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri yang bersifat tidak langsung dan objektif oleh orang pribadi atau badan (Purwono, 2010, h. 272). Subjek pajak PPN meliputi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Bukan Pengusaha Kena Pajak. Sedangkan objek pajak PPN meliputi Pasal UU PP, Pasal 16C dan 16D UU PPN.

2.4 Barang Kena Pajak

Prinsipnya semua barang merupakan Barang Kena Pajak (BKP), kecuali barang-barang tertentu yang diatur oleh pemerintah sebagai Barang Tidak Kena Pajak (BTKP). Dalam sistem PPN di Indonesia, pengertian barang meliputi barang berwujud dan barang tidak berwujud (Rosdiana,Irianto, Putranti, 2011, h. 117).

2.5 PPN Usaha Kendaraan Bermotor Bekas

Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan kendaraan bermotor bekas diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 79/PMK.03/2010. Kendaraan bermotor bekas adalah kendaraan bermotor, baik beroda dua atau lebih yang kondisinya bukan baru dan telah terdaftar pada instansi yang berwenang atau memiliki nomor polisi (Resmi, 2016, h.196). Kegiatan usaha ini dalam memperhitungkan PPN-nya menggunakan pedoman perhitungan pengkreditan Pajak Masukan.

**Tabel 2.1 Mekanisme Pedoman Penghitungan Pengkreditan
Pajak Masukan Berdasarkan PMK/79/2010**

Pajak Keluaran yang dipungut	10% dari harga jual
Pajak yang disetorkan ke Negara	1% dari Pajak Keluaran. Selisih 9% dianggap sebagai pajak masukan.
Perolehan Pajak Masukan Pengusaha	Tidak dapat dikreditkan atau dibiayakan untuk penghitungan Pajak Masukan
Pengguna pedoman	Pengusaha mobil bekas yang semata-mata menyerahkan mobil bekas secara eceran.
SPT Masa PPN	Formulir SPT Masa 1111 DM

Sumber: diolah (2017)

2.6 Pengertian Kontribusi

Menurut T. Guritno dalam (Rosalina, 2008 : 28), Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan, biaya, atau kerugian tertentu atau bersama. Kontribusi dapat dihitung dengan cara realisasi penerimaan PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas dibagi dengan realisasi PPN secara keseluruhan dan dikalikan 100%.

Tabel 2.2 Rasio Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Halim, (2004;163) dalam (Aprilian, Sudjana, Yaningwati, 2014)

Perhitungan rata-rata pertumbuhan PPN atas penyerahan mobil bekas menggunakan rumus menurut Sembiring (1985:17) dalam (Ratnaningrum, 2007) Adapun rumus perhitungannya sebagai berikut:

$$\text{Rata-Rata Pertumbuhan} = \left(\frac{\text{Realisasi Tahun Akhir}}{\text{Realisasi Tahun Awal}} \right)^{\frac{1}{n}} - 1 \times 100\%$$

3. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (lawannya adalah *eksperimen*) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara *triangulasi* (gabungan), menganalisis data yang bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada *generalisasi* (Sugiyono, 2014, h.8-9).

3.2 Objek/Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan mobil bekas. Sedangkan subjek penelitian dalam penelitian ini

adalah adalah KPP Pratama Palembang Ilir Timur yang terletak di Jalan Kapten Ahmad Rivai No.4, Sungai Pangeran, Ilir Timur I Kota Palembang.

3.3 Pemilihan Informan Kunci

Dalam penelitian ini, informan kunci berasal dari 4 (empat) kalangan perwakilan yang berbeda yaitu Perwakilan DJP dari KPP Pratama Palembang Ilir Timur, Perwakilan Praktisi Perpajakan, Perwakilan Akademisi Perpajakan, dan Perwakilan Pengusaha Mobil Bekas.

3.4 Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer di dalam penelitian ini adalah dari hasil wawancara. Sedangkan data sekunder di dalam penelitian ini adalah data realisasi penerimaan PPN atas penyerahan mobil bekas tahun 2014-2016, data realisasi penerimaan PPN secara keseluruhan tahun 2014-2016 yang didapat dari KPP Pratama Palembang Ilir Timur, dan pencatatan akuntansi atas transaksi mobil bekas oleh pengusaha mobil bekas.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Wawancara merupakan proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara melakukan tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara (Nazir, 2013, h.170). Sedangkan observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis (Sugiyono, 2014, h.145).

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Dalam metode ini, penulis akan mendeskripsikan atau menggambarkan suatu kondisi dan situasi dari peristiwa atau kejadian yang memusatkan kepada masalah nyata atau berlangsung sebagaimana adanya. Analisis data adalah berbentuk pernyataan dan uraian yang disusun secara otomatis dan bukan berbentuk perhitungan angka statistik kuantitatif.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah KPP Pratama Palembang Ilir Timur

KPP Pratama Palembang Ilir Timur berdiri berdasarkan Pasal 76 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.01/2006 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP). Kantor ini beralamat di Jalan Kapten Ahmad Rivai No. 4, Kelurahan Sungai Pangeran, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang 30129.

Wilayah kerja KPP Pratama Palembang Ilir Timur meliputi 5 (lima) kecamatan di Kota Palembang yaitu, Kecamatan Ilir Timur I, Kecamatan Ilir Timur II, Kecamatan Kemuning, Kecamatan Kalidoni, dan Kecamatan Sako. Adapun tugas KPP Pratama Palembang Ilir Timur ini adalah melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM, Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam wilayah wewenanganya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.1.2 Visi dan Misi KPP Pratama Palembang Ilir Timur

1. Visi

“Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi Perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi”.

2. Misi

“Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui sistem administrasi Perpajakan yang efektif dan efisien”.

4.1.3 Struktur Organisasi KPP Pratama Palembang Ilir Timur

Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Palembang Ilir Timur



Sumber: KPP Pratama Palembang (2017)

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Mekanisme Pengenaan PPN Atas Penyerahan Mobil Bekas Oleh Pengusaha Mobil Bekas

1. Proses Perhitungan

Tahapan pertama adalah menganalisis pada saat penyerahan (penjualan) mobil bekas kepada pembeli. Hal tersebut diuraikan ke dalam Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1 Transaksi Penyerahan Mobil Bekas Dalam 1 (Satu) Bulan

Transaksi Penyerahan	Analisis	Pencatatan
Secara tunai, seharga Rp145 Juta.	Terutang PPN, Rp145 Juta (DPP) Rp14,5 Juta (PPN 10%), dibuatkan Faktur Pajak.	Bank/Cash Rp159,5 Juta Penjualan/Sales Rp145 Juta Pajak Keluaran Rp14,5 Juta
Secara tunai,	Terutang PPN,	Bank/Cash Rp209 Juta

seharga Rp190 Juta.	Rp190 Juta (DPP) Rp19 Juta (PPN 10%), dibuatkan Faktur Pajak.	Penjualan/Sales Rp190 Juta Pajak Keluaran Rp19 Juta
Secara tunai, seharga Rp130 Juta.	Terutang PPN, Rp130 Juta (DPP) Rp13 Juta (PPN 10%), dibuatkan Faktur Pajak.	Bank/Cash Rp143 Juta Penjualan/Sales Rp130 Juta Pajak Keluaran Rp13 Juta
Secara tunai, seharga Rp180 Juta.	Terutang PPN, Rp180 Juta (DPP) Rp18 Juta (PPN 10%), dibuatkan Faktur Pajak.	Bank/Cash Rp198 Juta Penjualan/Sales Rp180 Juta Pajak Keluaran Rp18 Juta
Secara tunai, seharga Rp125 Juta.	Terutang PPN, Rp125 Juta (DPP) Rp12,5 Juta (PPN 10%), dibuatkan Faktur Pajak.	Bank/Cash Rp137,5 Juta Penjualan/Sales Rp125 Juta Pajak Keluaran Rp12,5 Juta

Sumber: diadopsi penulis dari (Resmi, 2016, h.195)

Tahapan kedua dari proses ini adalah menghitung Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Pada perhitungan ini, Pajak Masukan berasal dari 90% Pajak Keluaran, inilah yang boleh dikreditkan oleh pengusaha mobil bekas. Seperti yang terlihat pada Tabel 4.2 di bawah ini.

Tabel 4.2 DPP dan PPN (Pajak Keluaran) Transaksi Atas Penyerahan Mobil Bekas Dalam 1 (Satu) Bulan

DPP	PPN (Pajak Keluaran)	Diisikan Pada SPT
Rp145 Juta	Rp14,5 Juta	1111 A DM
Rp190 Juta	Rp19 Juta	1111 A DM
Rp130 Juta	Rp13 Juta	1111 A DM
Rp180 Juta	Rp18 Juta	1111 A DM
Rp125 Juta	Rp12,5 Juta	1111 A DM
Rp150 Juta	Rp15 Juta	1111 A DM
Rp165 Juta	Rp16,5 Juta	1111 A DM
Total = Rp1,85 Miliar, diisikan pada Formulir 1111 DM-I.A.	Total = Rp108,5 Juta, diisikan pada Formulir 1111 DM-II.A.1.	

Sumber: diadopsi penulis dari (Resmi, 2016, h.197)

Perhitungan Pajak Masukan tersebut adalah sebagai berikut:

- Pajak Masukan = $90\% \times \text{Pajak Keluaran}$
= $90\% \times \text{Rp108,5 Juta}$
= Rp97,65 Juta

- Pencatatan

Pajak Masukan	Rp97,65 Juta
Penjualan <i>Deemed/Sales Deemed</i>	Rp97,65 Juta

Di akhir bulan,

Pajak Keluaran	Rp97,65 Juta
Penjualan <i>Deemed/Sales Deemed</i>	Rp97,65 Juta

2. Proses Penyetoran

Perhitungan pajak yang disetorkan adalah sebagai berikut:

- Pajak Keluaran = Rp108,5 Juta
 - Pajak Masukan = Rp97,65 Juta (-)
 - PPN yang disetor = Rp10,85 Juta
- untuk PPN yang akan disetorkan adalah sebesar Rp10,85 Juta.

- Pencatatan

Pajak Keluaran	Rp10,85 Juta
Bank/Cash	Rp 10,85 Juta

Mulai tanggal 1 Juli tahun 2016 Wajib Pajak dalam melakukan proses pembayaran/penyetoran pajak terutang diwajibkan menggunakan e-Billing System, hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ/2016. Batas waktu penyetoran PPN adalah pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan. Apabila Wajib Pajak terlambat melakukan penyetoran pajak PPN setelah jatuh tempo, maka penyetoran akan dikenakan sanksi bunga sebesar 2% per bulan dari setiap Masa PPN yang terutang.

3. Proses Pelaporan

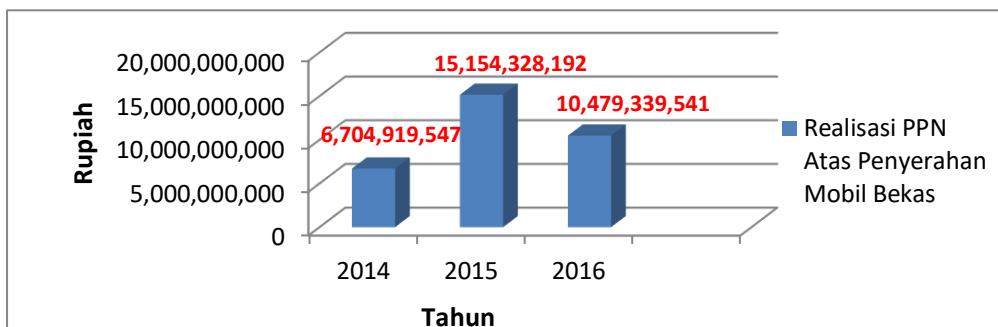
Pelaporan untuk pengusaha mobil bekas menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN 1111 DM. Penyampaian pelaporan untuk PPN atas transaksi penyerah mobil bekas ini dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu, dengan menyampaikannya langsung (datang) ke KPP terdekat, atau secara online melalui aplikasi e-Filing. Batas waktu pelaporan PPN adalah pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Apabila Wajib Pajak terlambat melakukan pelaporan untuk SPT Masa PPN, maka dikenakan denda sebesar Rp500.000 untuk setiap Masa PPN yang terutang.

Secara umum, mekanisme Pengenaan PPN pada transaksi penyerahan mobil bekas sudah seharusnya dilakukan oleh pengusaha mobil bekas. Akan tetapi pada kenyataannya tidak demikian. Fakta yang penulis temukan adalah masih terdapat pengusaha mobil bekas di Kota Palembang tidak melakukan pengenaan PPN atas penyerahan mobil bekas. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman dan pengetahuan mereka tentang peraturan pajak yang membahas jenis pajak PPN untuk sektor bisnis ini.

4.2.2 Kontribusi PPN Atas Penyerahan Mobil Bekas di KPP Pratama Palembang Ilir Timur

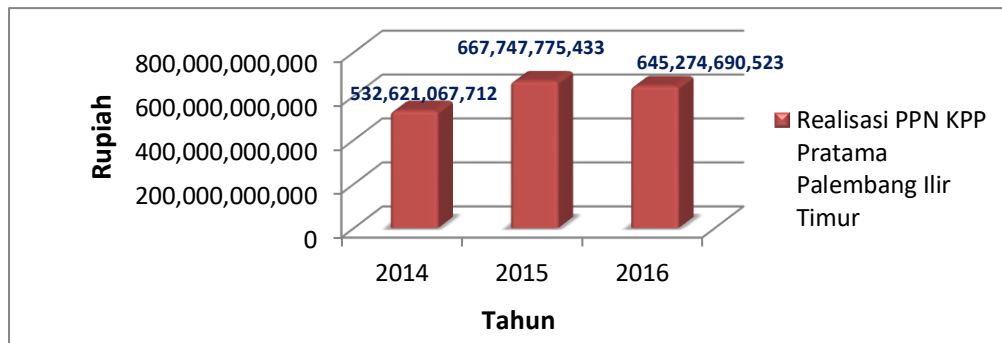
Berikut adalah data yang diperoleh dari KPP Pratama Palembang Ilir Timur, sebagaimana telah diolah oleh peneliti dalam Grafik 4.1 dan Grafik 4.2 dibawah ini.

Grafik 4.1 Data Realisasi PPN Atas Penyerahan Mobil Bekas Tahun 2014-2016



Sumber: KPP Pratama Palembang Ilir Timur, diolah (2017)

**Grafik 4.2 Data Realisasi PPN KPP Pratama Palembang Ilir Timur
Tahun 2014-2016**



Sumber: KPP Pratama Palembang Ilir Timur, diolah (2017)

Perhitungan kontribusi PPN atas penyerahan mobil bekas yang terdapat di KPP Pratama Palembang Ilir Timur adalah sebagai berikut.

a. Tahun 2014

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi Tahun 2014} &= \frac{6.704.919.547}{532.621.067.712} \times 100\% \\ &= 1,25\%\end{aligned}$$

b. Tahun 2015

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi Tahun 2015} &= \frac{15.154.328.192}{667.747.775.433} \times 100\% \\ &= 2,26\%\end{aligned}$$

c. Tahun 2016

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi Tahun 2016} &= \frac{10.479.339.541}{645.274.690.523} \times 100\% \\ &= 1,62\%\end{aligned}$$

Selanjutnya hasil perhitungan tersebut dikelompokkan ke dalam tabel, agar mudah untuk dipahami. Sebagaimana dimuat dalam Tabel 4.1 sebagai berikut.

Tabel 4.3 Kontribusi PPN Atas Penyerahan Mobil Bekas di KPP Pratama Palembang Ilir Timur

Tahun	Realisasi PPN Mobil Bekas	Realisasi PPN Keseluruhan	Persentase %	Kriteria
2014	6.704.919.547	532.621.067.712	1,25%	Sangat Kurang
2015	15.154.328.192	667.747.775.433	2,26%	Sangat Kurang
2016	10.479.339.541	645.274.690.523	1,62%	Sangat Kurang

Sumber: KPP Pratama Palembang Ilir Timur, diolah (2017)

Berdasarkan tabel 4.1 di atas kontribusi PPN atas penyerahan mobil bekas di KPP Pratama Palembang Ilir Timur pada tahun 2014 adalah sebesar 1,25%, kemudian pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi sebesar 2,26%. Lalu pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi sebesar 1,62%. Jika dilihat dari tiga tahun terakhir, maka kontribusi pajak PPN atas penyerahan mobil bekas selalu berada di kategori sangat kurang.

Kemudian analisis data dilanjutkan dengan menghitung rata-rata pertumbuhan PPN atas penyerahan mobil bekas dari tahun 2014 sampai dengan 2016. Perhitungan rata-rata pertumbuhan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Rata-Rata Pertumbuhan} &= \left(\frac{10.479.339.541}{6.704.919.547} \right)^{\frac{1}{3}} - 1 \times 100\% \\ &= 16,05\%\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka didapatkan rata-rata pertumbuhan realisasi PPN atas penyerahan mobil bekas dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 (selama 3 tahun) yaitu sebesar 16,05%.

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi penerimaan dari sektor PPN atas penyerahan mobil bekas ini. Pertama adalah transaksi penjualan bisnis atau pertumbuhan bisnis dari mobil bekas itu sendiri. Kemudian faktor yang kedua adalah kesadaran dari pelaku bisnis itu sendiri.

Dalam meningkatkan penerimaan PPN atas penyerahan mobil bekas, pihak KPP Pratama Palembang Ilir Timur menghadapi kendala dalam hal pengawasan. Kendala tersebut adalah adanya aturan bahwa tidak diwajibkannya pengusaha mobil bekas untuk membuat e-Faktur, dimana pengusaha mobil bekas digolongkan sebagai pedagang eceran. Aturan tersebut dimuat dalam Pasal 2 Peraturan Jenderal Pajak Nomor 16 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa khusus pedagang eceran, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012, sehingga pada praktiknya mekanisme faktur pajak yang dibuat oleh pedagang eceran adalah dengan cara digunggung secara keseluruhan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Mekanisme pengenaan PPN atas penyerahan mobil bekas oleh Pengusaha Kena Pajak Mobil Bekas dilakukan dengan 3 (tiga) proses , yaitu proses perhitungan, proses penyeteroran, dan proses pelaporan. Akan tetapi masih terdapat pengusaha mobil tidak melakukan pengenaan pajak PPN atas transaksi penjualan mobil bekas. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman dan pengetahuan mereka terhadap peraturan yang membahas tentang jenis pajak PPN sektor ini yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK/No.79/2010.
2. Kontribusi penerimaan PPN atas penyerahan mobil bekas pada tahun 2014 sampai dengan 2016 masih dalam kategori sangat kurang. Kontribusi pada tahun 2014 adalah sebesar 1,25%, pada tahun 2015 meningkat menjadi 2,26%, dan pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 1,62%. Selain itu rata-rata pertumbuhan penerimaannya dari tahun 2014 sampai dengan 2016 adalah sebesar 16,05%. Adapun faktor yang mempengaruhi penerimaan kontribusi ini adalah naik turunnya pertumbuhan bisnis mobil bekas dan kesadaran dari para pelaku bisnis mobil bekas.
3. Adanya celah pajak yang dapat dimanfaatkan oleh pengusaha mobil bekas yaitu dengan diperbolehkannya untuk tidak membuat e-Faktur, menjadi kendala pihak fiskus dalam melakukan pengawasan terhadap sektor bisnis ini. Hal ini dikarenakan tidak ada data transaksi yang terekam, sehingga sulit untuk menentukan besarnya nilai transaksi dan secara otomatis pajak yang disetorkan belum tentu benar.

5.2. Saran

1. KPP Pratama Palembang Ilir Timur dapat melakukan sosialisasi para pelaku usaha mobil bekas. Hal ini bertujuan untuk membangun pemahaman dan pengetahuan Wajib Pajak tentang aturan perpajakan.
2. KPP Pratama Palembang Ilir Timur dapat meningkatkan pengawasan terhadap sektor bisnis ini yaitu dengan pengamatan langsung yang dilakukan di lapangan agar dapat memiliki gambaran mengenai potensi Objek pajak.
3. Pembaruan dan pembenahan aplikasi perpajakan oleh pihak DJP sangat dibutuhkan untuk menunjang proses pengawasan.

4. Pemberian sanksi yang tegas dapat mengurangi tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilian, Sudjana, Yaningwati 2014, *Analisis Potensi Penerimaan dan Efektivitas PPN atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas Terhadap Penerimaan PPN (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)*, Jurnal, Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang, Diakses 23 Agustus 2017, dari perpajakan.studentjournal.ub.ac.id.
- Bernas 2017, *Menhub Ingin Masyarakat Palembang Lakukan Perubahan Gaya Hidup Lewat Ini*, Diakses 29 Agustus 2017, dari www.bernas.id.
- Fransiska, Dinatri 2014, *Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Garuda Express Delivery Cabang Semarang*, Jurnal Akuntansi, Akuntansi, Universitas Dian Nuswantoro, Semarang, Diakses 23 Agustus 2017, dari eprints.dinus.ac.id.
- Halim, Abdul 2016, *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*, Salemba Empat, Jakarta.
- Kajian Fiskal Regional Sumsel Kanwil DJP Sumsel Babel 2016, *Publikasi Kajian Fiskal Regional Sumsel Triwulan I 2016 dan Triwulan II 2016*, Diakses 4 Agustus 2017, dari www.kanwildjpsumsel.net.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia 2017, *Pengertian Kontribusi*, Diakses 4 September 2017, dari www.kbbi.web.id.
- Nazir, Moh 2013, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014, tentang *Tata Cara Pembuatan Dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik*, Diakses 15 November 2017, dari www.ketentuan.pajak.go.id.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2010, tentang *Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Kegiatan Usaha Tertentu*, Diakses 15 November 2017, dari www.ketentuan.pajak.go.id.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013, tentang *Tata Cara Pembuatan Dan Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian Faktur Pajak*, Diakses 15 November 2017, Diakses 15 November 2017, dari www.ketentuan.pajak.go.id.
- Purwono, Herry 2010, *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*, Erlangga, Jakarta.
- Ramadhan, Tinton 2011, *Perubahan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Mobil Bekas*, Skripsi S1, Ilmu Administrasi Fiskal, Universitas Indonesia, Depok, Diakses 23 Agustus 2017, dari lib.ui.ac.id.
- Ratnaningrum, Dewi 2007, *Tingkat Pertumbuhan Penduduk Periode 1995-2005 Kabupaten Kudus Dan Ramalan Jumlah Penduduk Tahun 2008 Dengan Metode Smoothing*, Tugas Akhir Studi Diploma III, Statistika Terapan Dan Komputasi, Fakultas Matematika Dan

Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Diakses 5 Januari 2018, dari lib.unnes.ac.id.

Resmi, Siti 2014, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Buku 1, Salemba Empat, Jakarta.

Resmi, Siti 2016, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Buku 2, Salemba Empat, Jakarta.

Rosdiana, Irianto, Putranti 2011, *Teori Pajak Pertambahan Nilai*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Rosalina, FA 2008, *Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Setelah Otonomi Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kepulauan Riau)*, Skripsi S1, Akuntansi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, Diakses 23 Agustus 2017, dari www.repository.usd.ac.id.

Sambur, Sondakh, Sabijono 2015, *Analisis Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBm) Terhadap Daya Beli Konsumen kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat dan Roda Dua PT.Hasjrat Abadi Manado)*, Jurnal Ilmiah, Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Diakses 24 Agustus 2017, dari ejournal.unsrat.ac.id.

Saptono, Budi P 2017, *Buku Pintar Pajak*, PT Pratama Indomitra Konsultan, Jakarta.

Sindonews, 2016, *Jual Beli Mobil Bekas Melemah*, Diakses 29 Januari 2018, dari www.autotekno.sindonews.com.

Sumeks, 2017, *Mobkas "Legend", di Bawah 100 Juta*, Diakses 29 Januari 2018, dari www.sumeks.co.id.

Sugiyono 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Sukardji, Untung 2015, *Pajak Pertambahan Nilai Edisi Revisi 2015*, Rajawali Pers, Jakarta.

Suryana, Inasius 2014, *Analisis Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setia Budi Satu*, Jurnal Ilmiah, Akuntansi, Universitas Bina Nusantara, Jakarta, Diakses 23 Agustus 2017, dari thesis.binus.ac.id.

Tribunnews, 2015, *Showroom Mobkas Terpaksa Jual Aset*, Diakses 29 Januari 2018, dari www.palembang.tribunnews.com.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, tentang *Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*, Diakses 4 September 2017, dari www.ketentuan.pajak.go.id.